BAB II
GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

2.1. Kondisi Umum Kota Ambon

2.1.1. Kondisi Geografi dan Demografi

a. Kondisi Geografi

Kota Ambon adalah kota di Pulau Ambon, suatu pulau kecil di Provinsi Maluku, suatu provinsi Kepulauan. Dalam ruang nasional, Kota Ambon adalah Pusat Kegiatan Nasional (PKN) di Propinsi Maluku.

1) Luas, Letak dan Batas Administrasi Kota Ambon

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1979, kota Ambon memiliki luas 377 Km^2 atau 2/5 dari luas wilayah Pulau Ambon. Luas daratan Kota Ambon berdasarkan hasil Survey Tata Guna Tanah tahun 1980 adalah 359,45 km^2, sedangkan luas lautan 17,55 Km^2 dengan panjang garis pantai 98 Km.

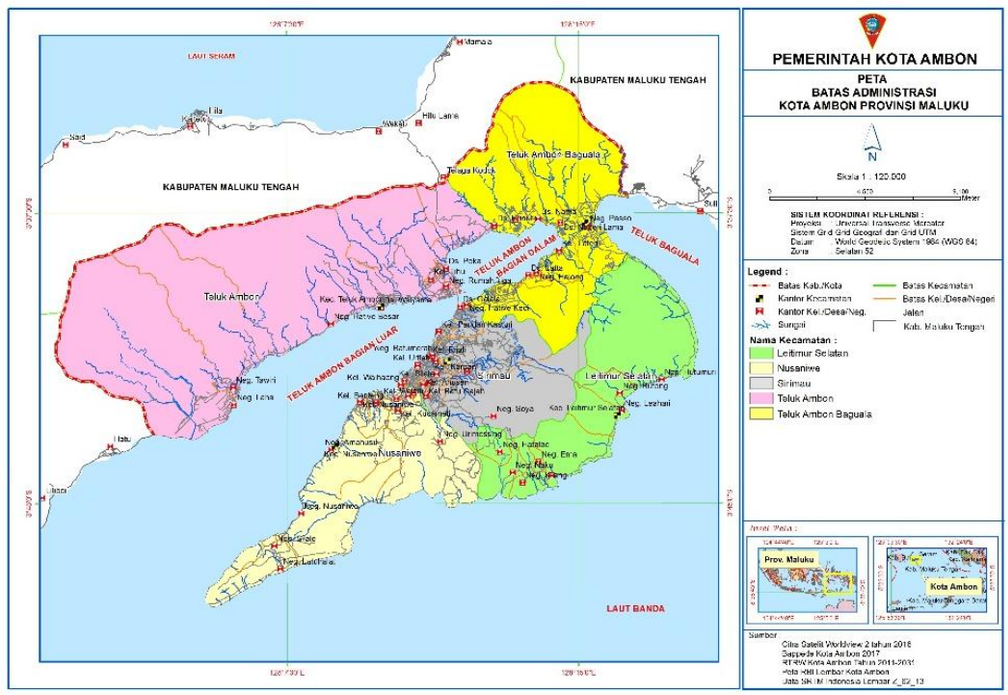

Sumber: Bappeda LitbangKota Ambon, 2017

Gambar II.1. Wilayah Administrasi Kota Ambon dengan 5 Kecamatan

Secara Astronomis, wilayah administrasi Kota Ambon berada antara 3°34'4,80" sampai 3°47'38,40" Lintang Selatan, dan 128°1'33,60" sampai 128°18'7,20" Bujur Timur (Gambar II.1), dan dikelilingi oleh pantai serta diapit oleh teluk, yaitu Teluk Ambon, dan Teluk Baguala. Batas-batas administrasi Kota Ambon adalah:

- Sebelah Utara : Petuanan Negeri Hitu, Negeri dan Kaitetu dari Kecamatan Leihutu Kabupaten Maluku Tengah.
- Sebelah Selatan : Laut Banda
- Sebelah Timur : Petuanan Negeri Suli dari Kecamatan Salahutu Kabupaten Maluku Tengah.
- Sebelah Barat : Petuanan Negeri Hatu dari Kecamatan Leihitu Barat Kabupaten Maluku Tengah

Secara administrasi, Kota Ambon terdiri dari 5 kecamatan yang meliputi 20 kelurahan dan 30 desa/negeri (Gambar II.1). Jumlah desa/ negeri dan kelurahan serta luas setiap kecamatan adalah seperti pada Tabel II.1.

Tabel II.1. Keadaan Wilayah Administrasi Kota Ambon Per Kecamatan

No.	Kecamatan	Ibukota	Jumlah Desa/Negeri/ Kelurahan		Luas Wilayah Daratan (Km^2)
			Desa/ Negeri	Kelurahan	
1	Nusaniwe	Amahusu	5	8	88,35
2	Sirimau	Karang Panjang	4	10	86,82
3	T.A.Baguala	Passo	6	1	40,11
4	Leitimur Selatan	Leahari	8	-	50,50
5	Teluk Ambon	Wayame	7	1	93,67
Kota Ambon			**30**	**20**	**359,45**

Sumber: BPS Kota Ambon, 2017

2) Topografi Kota Ambon

Kota Ambon terletak di Pulau Ambon adalah bagian dari kepulauan Maluku yang merupakan pulau-pulau busur vulkanis, sehingga secara umum Kota Ambon memiliki wilayah yang sebagian besar terdiri dari daerah berbukit dan berlereng.

Kondisi topografi wilayah Kota Ambon, meliputi wilayah daratan berbukit sampai berlereng terjal dengan kemiringan di atas 20%, sebesar 73% wilayah; sedangkan wilayah daratan lainnya yang cenedrung datar atau landai dengan kemiringan kurang dari 20% sebesar 17% wilayah; serta sisa sekitar 10% adalah pantai, pesisir dan teluk (Gambar II.2).

Keadaan topografi Kota Ambon secara umum dapat dikelompokkan sebagai berikut:

a) Topografi relatif datar dengan ketinggian 0-100 meter dan kemiringan 0-10% terdapat di kawasan sepanjang pantai dengan radius antara 0-300 meter dari garis pantai.
b) Topografi landai sampai miring dengan ketinggian 0-100 meter dan kemiringan 10-20% terdapat pada kawasan yang lebih jauh dari garis pantai (100 meter kearah daratan).

c) Topografi bergelombang dan berbukit terjal dengan ketinggian 0-100 meter dan kemiringan 20-30% terdapat pada kawasan perbukitan.
d) Topografi terjal dengan ketinggian lebih dari 100 meter dan kemiringan lebih dari 30% terdapat pada kawasan pegunungan.

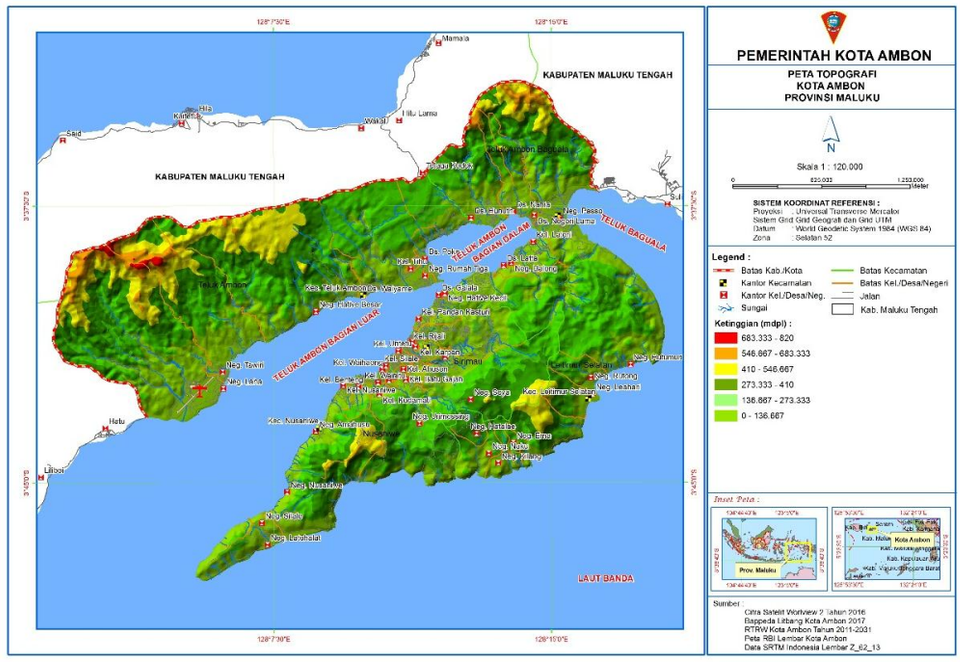

Sumber: Bappeda Litbang Kota Ambon, 2017

Gambar II.2. Peta Topografi Kota Ambon

3) Iklim

Kota Ambon dipengaruhi oleh 2 Iklim yaitu Iklim Tropis dan Iklim Musim. Kota Ambon dipengaruhi oleh Iklim tropis karena letaknya di sekitar Garis Katulistiwa, dengan penyinaran matahari sepanjang tahun. Kota Ambon dipengaruhi oleh Iklim Musim karena berada dikelilingi lautan yang dapat mengalami perubahan tekanan udara.

Iklim musim yang terjadi adalah musim Barat atau Utara; dan musim Timur atau Tenggara. Pergantian musim selalu diselingi oleh musim Pancaroba yang merupakan transisi dari kedua musim tersebut. Musim Barat umumnya berlangsung dari bulan Desember sampai bulan Maret, dimana bulan April merupakan masa transisi ke musim Timur. Sedangkan musim Timur berlangsung dari bulan Mei sampai bulan Oktober, dimana bulan Nopember merupakan masa transisi ke musim Barat.

Mengacu kepada data curah hujan oleh Stasiun Meteorologi Ambon, yang dipublikasi oleh BPS Kota Ambon, maka selama tahun 2010 - 2017, curah hujan tahunan tertinggi di Kota Ambon terjadi pada tahun 2017 yaitu sebesar 5.435 mm, dan curah hujan tahunan terendah adalah pada tahun 2015 yaitu sebesar 2.108,0 mm (Gambar II.3). Curah hujan tertinggi pada tahun 2017, jika dibandingkan dengan curah hujan tahun 2012

sebesar 5.041,2 mm, tidak menimbulkan bencana banjir dan longsor yang parah sebagaimana kondisi tahun 2012.

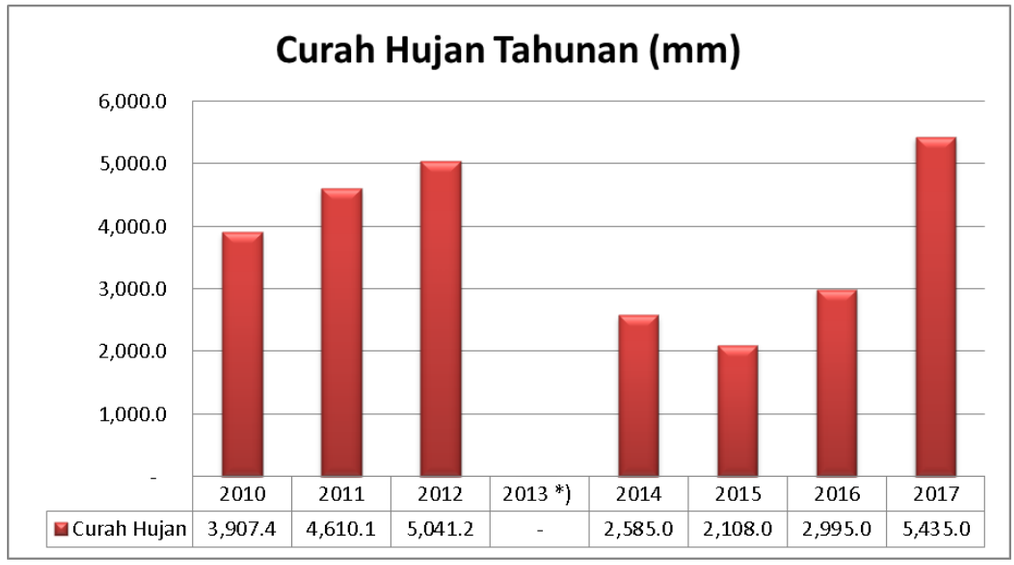

*) Tahun 2013, tidak ada data karena alat tidak beroperasi
Sumber: Stasiun Meteorologi Ambon, 2018 dan BPS Kota Ambon, 2017

Gambar II.3. Curah Hujan Tahunan Kota Ambon Tahun 2010 - 2017

Jika mengacu data curah hujan bulanan selama tahun 2010-2017 (Gambar II.4), rata-rata bulan basah (musim hujan) dengan curah hujan di atas 200 mm terjadi bervariasi pada bulan Maret hingga September, seiring dengan berlangsung Musim Timur. Sedangkan puncak-puncak musim hujan setiap tahun pada tahun 2010-2017, dengan curah hujan bulanan tertinggi, terjadi antara bulan Mei sampai Agustus.

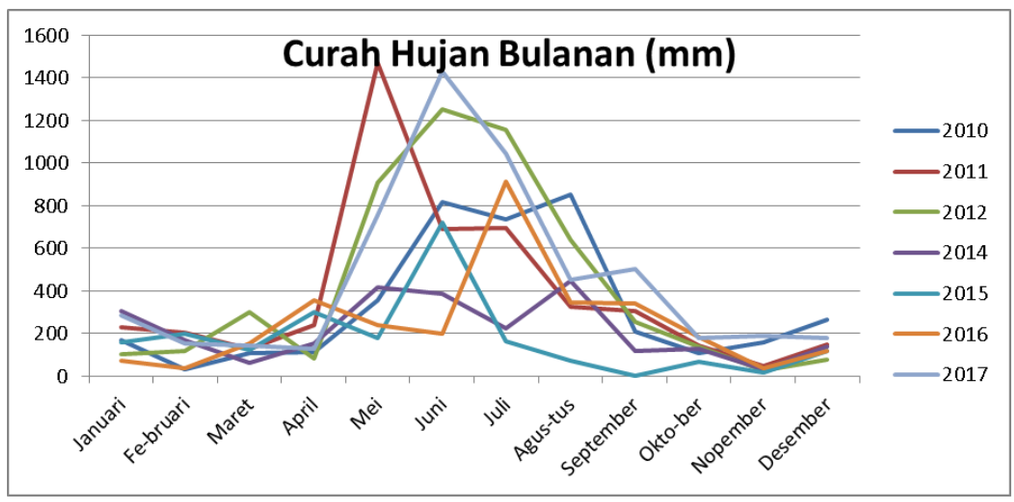

Sumber: Stasiun Meteorologi Ambon, 2018 dan BPS Kota Ambon, 2017

Gambar II.4. Curah Hujan Bulanan Kota Ambon Tahun 2010-2016

Curah hujan tertinggi per bulan di setiap tahun pada tahun 2010-2017 adalah tahun 2010 terjadi di bulan Agustus sebesar 848,9 mm, tahun 2011 terjadi di Bulan Mei sebesar 1.467,5 mm, tahun 2012 terjadi di Bulan Juni sebesar 1.252,1 mm, tahun 2014 terjadi di bulan Agustus sebesar 448 mm, tahun 2015 terjadi di bulan Juni sebesar 718 mm, tahun 2016 terjadi di bulan Juli sebesar 914 mm, dan tahun 2017 terjadi di bulan Juni sebesar 1.430 mm.

Pada sisi lain, rata-rata bulan kering (musim panas) dengan curah hujan di bawah 200 mm, terjadi dari bulan Oktober hingga Maret seiring dengan berlangsungnya Musim Barat. Curah hujan terendah per bulan di setiap tahun pada tahun 2010-2016 adalah tahun 2010 terjadi di Bulan Februari sebesar 30,8 mm, tahun 2011 terjadi di Bulan November sebesar 44,4 mm, tahun 2012 terjadi di Bulan Desember sebesar 75 mm, tahun 2014 terjadi di Bulan November sebesar 32 mm, tahun 2015 terjadi di Bulan September sebesar 3 mm, tahun 2016 terjadi di Bulan Februari sebesar 34 mm, dan tahun 2017 terjadi di Bulan April sebesar 129 mm.

Jika membandingkan curah hujan Kota Ambon tahun 2017, dan rata-rata tahun 2010-2017 (Gambar II.5), maka curah hujan tahun 2017 menunjukan irama yang hampir sama dengan curah hujan rata-rata tahun 2010-2017. Selama tahun 2017, curah hujan terjadi hampir merata setiap bulan, yaitu diatas 100 mm per bulan, dengan trend tinggi terjadi pada bulan Mei, Juni, Juli, dan Agustus. Meskipun curah hujan tahun 2017 yaitu sebesar 5.435 mm per tahun, adalah tertinggi sejak tahun 2010, namun karena terjadi hampir merata di setiap bulan, menyebabkan bencana banjir dan longsor yang parah seperti tahun 2012 dapat dihindari.

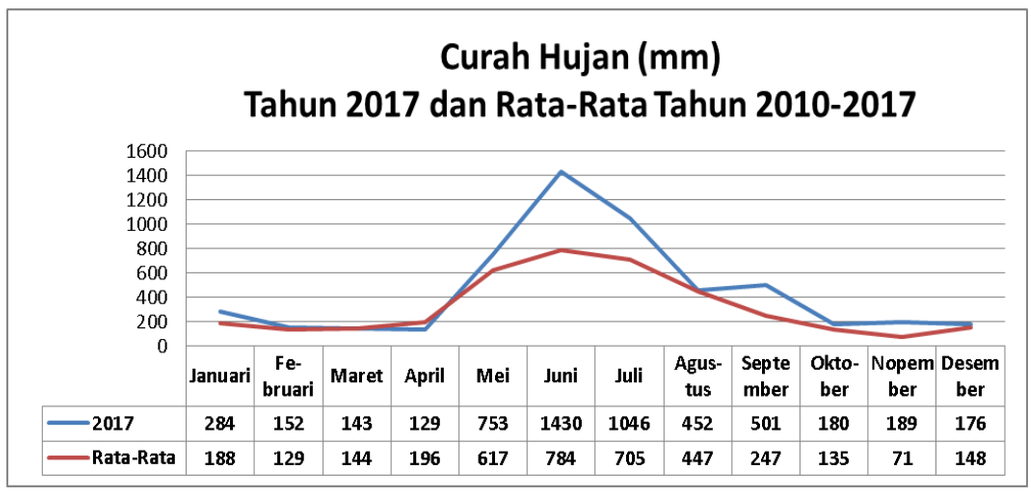

	Januari	Fe-bruari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agus-tus	Septe mber	Okto-ber	Nopem ber	Desem ber
2017	284	152	143	129	753	1430	1046	452	501	180	189	176
Rata-Rata	188	129	144	196	617	784	705	447	247	135	71	148

Sumber: Stasiun Meteorologi Ambon, 2018 dan BPS Kota Ambon, 2017

Gambar II.5. Curah Hujan Bulanan Kota Ambon Tahun 2017 dan Rata-Rata Tahun 2010-2017

Jika berkaca pada rata-rata curah hujan selama tahun 2010-2017 (Gambar II.5), maka curah hujan yang tinggi cenderung terjadi di bulan Mei, Juni, Juli, dan Agustus, dengan curah hujan tertinggi terjadi dibulan Juni sebesar 784 mm, diikuti dengan bulan Juli sebesar 705 mm, dan bulan Mei sebesar 617 mm. Sedangkan bulan kering, terjadi di bulan November sebesar 71 mm.

Selain itu, mengacu kepada trend hujan harian di Kota Ambon selama tahun 2017 (Gambar II.6), menunjukan bahwa setiap bulan hampir merata terjadi hujan di Kota Ambon. Selama tahun 2017 terdapat 280 hari hujan, atau ada terjadi hujan di 280 hari pada tahun 2017 atau 77 % dari hari-hari selama tahun 2017. Hari hujan terbanyak terjadi di bulan Mei, Juni, dan Agustus, yaitu sebanyak 29 hari, sedangkan hari hujan tersedikit terjadi di bulan Oktober, yaitu 11hari.

Sumber: Stasiun Meteorologi Ambon, 2018

Gambar II.6. Hari Hujan Kota Ambon Tahun 2017

Tabel II.2. Kondisi Beberapa Komponen Iklim Kota Ambon Tahun 2010-2017

No.	Komponen	Tahun						
		2010	2011	2012	2014	2015	2016	2017
1	Penyinaran Matahari (%)	53.4	49.5	54.6	58.6	67	63	48
2	Tekanan Udara (mb)	1009.3	1009.2	1009.8	1011.4	1012.4	1011.4	1010.8
3	Kelembaban Nisbi (%)	86.3	85	86	84	83	83	87.5
4	Suhu Udara (°C)							
	a. Maksimum	30.2	29.6	29.7	30.2	30.4	31.9	32.5
	b. Minimum	24.1	23.5	23.7	23.9	24.3	24.2	23.4
	c. Rata-Rata	26.7	26.4	26.2	26.6	26.5	27.3	27.1

Sumber: Stasiun Meteorologi Ambon dan BPS Kota Ambon, 2016

Data klimatologi lain, untuk Kota Ambon berupa penyinaran matahari, tekanan udara, kelembaban nisbi, maupun suhu udara selama tahun 2010 – 2017, dapat dilihat pada Tabel II.2.

4) Kondisi Hidrologi

Sesuai dengan kondisi topografi Kota Ambon di pulau kecil, maka sungai-sungai di Kota Ambon memiliki karakter khusus yang terdiri dari banyak sungai kecil dengan Daerah Aliran Sungai (DAS) yang tidak luas dan sempit (Tabel II.3). Sungai-sungai yang mengalir umumnya tidak panjang. Sungai terpanjang adalah Way Sikula di Desa Laha dengan panjang mencapai 15,5 km, sedangkan sungai terpendek adalah Way Tomu dan Way Batu Gajah dengan panjang 1,5 km yang mengalir di pusat Kota Ambon.

Tabel II.3. Daerah Aliran Sungai di Kota Ambon

No.	Nama DAS	Luas (Ha)
1	**Wilayah DAS Wae Batu Merah**	**7940,27**
	a. DAS Way Tomu	564,00
	b. DAS Way Batu Gajah	545,75
	c. DAS Way Batu Gantung	1.729,32
	d. DAS WaY Ruhu	1.080,00
	e. Area Penggunaan Lain (APL)	4.021,20
2	**Wilayah DAS Way Pia Besar**	**13.609,29**

Sumber: Program Studi Ilmu Tanah Universitas Pattimura, 2012

Di kota Ambon terdapat 2 wilayah DAS, yaitu DAS Way Batu Merah di jazirah selatan Kota Ambon, dan DAS Way Pia Besar di jazirah utara Kota Ambon. Pada Wilayah DAS Way Batu Merah (Tabel II.3), yang meliputi sungai-sungai di kawasan Pusat Kota Ambon, saat ini telah mengalami penurunan fungsi, menjadi Area Penggunaan Lain (APL) untuk budidaya, khususnya permukiman, jalan, atau kebun campuran. Luas APL pada Wilayah DAS Way Batu Merah mencapai 4.021,20 Ha atau 50,64%. Hal ini telah memberikan dampak pada penurunan debit air baku pada sungai-sungai utama, yang jika tidak diantisipasi, dapat berdampak buruk di kemudian hari.

Selain penurunan fungsi DAS menjadi APL, sungai-sungai utama di Wilayah DAS Way Batu Merah, seperti Way Batu Gantung, Way Batu Gajah, Way Tomu, Way Batu Merah, dan Way Ruhu berada pada permukiman perkotaan yang padat, sehingga sering memiliki sanitasi lingkungan yang tidak sehat, seperti sampah, dan limbah domestik yang tidak terkelola.

Sementara itu, ketersediaan air tanah di kota Ambon dapat dikelompokkan atas: (1) ketersediaan rendah yang umumnya berada di perbukitan; (2) ketersediaan sedang di dataran rendah dan pesisir; serta (3) ketersediaan tinggi di beberapa tempat tertentu seperti di Negeri Tawiri, Desa Waiheru, pesisir Negeri Hutumuri, Negeri Rutong, dan Negeri

Urimesing. Sepanjang pesisir merupakan daerah dengan akuifer berproduksi baik, namun bukan merupakan daerah resapan yang potensial, sehingga ketersediaan air tanahnya adalah sedang.

5) Penggunaan Lahan

Penggunaan lahan di kota Ambon dilaksanakan berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Ambon Tahun 2011-2031, yang secara subtantif terdiri dari Rencana Struktur Ruang Kota Wilayah Kota Ambon, dan Rencana Pola Ruang Wilayah Kota Ambon.

Rencana struktur ruang wilayah Kota Ambon antara lain meliputi Sistem Pusat Pelayanan Kegiatan Kota dan rencana pengembangannya, meliputi:

a) Pusat Kota Ambon sebagai sentra primer, direncanakan melayani seluruh wilayah Kota Ambon, terutama SWP I; akan terus dikembangkan sebagai pusat penyelenggaraan pemerintahan provinsi maupun kota, perdagangan, jasa keuangan, perhubungan darat dan laut, industri perikanan, dan aneka industri, pariwisata, kesehatan, dan pendidikan, terutama untuk mendukung fungsi Kota Ambon sebagai PKN dan pelabuhan internasional.
b) Negeri Passo sebagai sentra sekunder I, direncanakan melayani wilayah Kota Ambon bagian Timur, terutama SWP II; akan terus dikembangkan sebagai pusat pemerintahan kecamatan, perdagangan, perhubungan darat dan laut, aneka industri, kesehatan, pendidikan kejuruan, pariwisata, dan pemukiman, terutama dalam mengurangi tekanan penduduk terhadap Pusat Kota Ambon;
c) Desa Wayame sebagai sentra sekunder II, direncanakan melayani SWP III; akan terus dikembangkan sebagai pusat pendidikan tinggi, ilmu pengetahuan dan teknologi, permukiman, pemerintahan kecamatan, aneka industri, pertanian tanaman pangan dan hortikultura, serta perikanan;
d) Negeri Amahusu sebagai Sentra tersier I, dan Negeri Latuhalat sebagai sentra tersier IV, direncanakan melayani SWP V; akan terus dikembangkan sebagai pusat pemerintahan kecamatan, industri rumah tangga, perikanan, perkebunan, peternakan, pariwisata, dan pemukiman;
e) Negeri Leahari-Rutong sebagai sentra tersier II, direncanakan melayani SWP IV; akan terus dikembangkan sebagai pusat pemerintahan kecamatan, pertanian hortikultura, perkebunan, peternakan, perikanan, pendidikan kejuruan, permukiman, dan pariwisata; ; serta
f) Negeri Tawiri-Laha, sebagai sentra tersier III, direncanakan membantu pelayanan kawasan khusus Bandar udara; akan terus dikembangkan sebagai kawasan pengamanan keselamatan penerbangan dan

pelayanan bandara distribusi tersier, disamping sebagai pusat pertanian tanaman pangan, perikanan, industri jasa maritim, dan pertambangan bahan galian golongan C.

Sementara itu, Rencana Pola Ruang Wilayah Kota Ambon meliputi rencana pola ruang kawasan lindung dan kawasan budidaya.

Rencana pola ruang kawasan lindung meliputi: (a) kawasan yang memberikan perlindungan kawasan bawahannya; (b) kawasan perlindungan setempat; (c) kawasan Ruang Terbuka Hijau (RTH); (d) kawasan pelestarian alam; (e) kawasan rawan bencana; (f) kawasan lindung geologi; dan (g) kawasan lindung lainnya.

Rencana pola ruang kawasan budidaya meliputi: (a) kawasan permukiman/ dan atau perumahan; (b) kawasan perdagangan dan jasa; (c) kawasan perkantoran; (d) kawasan industri kecil dan menengah; (e) kawasan pariwisata; (f) kawasan ruang terbuka non hijau; (g) kawasan ruang evakuasi bencana; (h) kawasan peruntukan ruang bagi kegiatan sektor informal; dan (i) kawasan peruntukan lainnya.

6) Kerawanan terhadap Bencana

Berdasarkan RTRW Kota Ambon Tahun 2011-2031, Kawasan rawan bencana di Kota Ambon meliputi: (1) kawasan rawan gempa, dan gerakan tanah, (2) kawasan rawan longsor, (3) kawasan rawan banjir, dan (4) kawasan rawan gelombang pasang dan tsunami.

Kawasan rawan gempa, dan gerakan tanah meliputi wilayah Kota Ambon. Bencana gempa bumi dapat terjadi karena pergeseran tiba-tiba dari lapisan tanah dibawah permukaan bumi. Ketika pergeseran ini terjadi, timbul getaran yang disebut gelombang seismik gempa ke segala arah di dalam bumi. Provinsi Maluku tergolong daerah berpotensi tinggi atau rawan dan rentan terhadap gempa bumi baik tektonik maupun vulkanik. Hal ini dipengaruhi oleh adanya kegiatan lempeng Halmahera, dan kegiatan lempeng Maluku ke arah barat dibawah busur Minahasa-Sangihe yang masih aktif sampai sekarang, seluruh kondisi ini secara tidak langsung juga berdampak terhadap Pulau Ambon.

Kawasan rawan longsor meliputi Negeri Hukurila, Negeri Soya, Negeri Hatalai, Negeri Ema, Negeri Kilang, Negeri Naku, Dusun Mahia, Dusun Tuni Negeri Amahusu, Negeri Batu Merah, Negeri Hative Besar, dan Negeri Nusaniwe. Kawasan rawan banjir meliputi sepanjang bantaran sungai Way Ruhu, Way Batu Merah, Way Tomu, Way Batu Gajah, Way Batu Gantung, Wayame, dan Wailela. Kawasan rawan gelombang pasang dan tsunami meliputi kawasan pesisir Kota Ambon.

Kondisi topografi yang berbukit-bukit di pulau yang kecil, menyebabkan Kota Ambon sangat rawan terhadap bencana alam banjir dan longsor ketika musim hujan. Selain itu keterbatasan lahan datar untuk permukiman, menyebabkan kawasan atas dan perbukitan yang semula adalah kawasan hijau, telah digunakan untuk permukiman, yang turut memicu kerentanan terhadap longsor dan banjir, dan berkurangnya debet air permukaan pada musim panas.

Trend bencana banjir dan longsor sering terjadi di puncak-puncak musim hujan, khususnya di bulan Mei, Juni, Juli, dan Agustus. Pada tahun 2017, pada puncak musim hujan tadi, terdapat bencana banjir, yang sporadis di 5 kecamatan. Banjir umumnya melanda kawasan-kawasan permukiman/ lahan di bantaran-bantaran sungai.

Gempa Bumi telah terjadi di Kota Ambon pada pada akhir Oktober Tahun 2017. Gempa bumi ini diakibatkan oleh adanya aktivitas sesar aktif naik Selatan Seram dengan mekanisme sumber sesar naik (*Thrust Fault*) di laut dengan kedalaman dangkal. Hal ini menyebabkan terjadi gempa teknonik dengan kekuatan 6,2 Skala Richter pada koordinat 3˚69‘ LS dan 127˚85‘ BT, kedalaman 46 km, berpusat di laut 38 km Barat Daya Kota Ambon. Dampak yang ditimbulkan dari gempa ini adalah terjadinya kerusakan pada infrastruktur sosial kemasyarakatan, sekolah, universitas, maupun Kantor Pemerintah. Sedangkan pada permukiman penduduk terdapat 3 unit rumah warga rusak ringan, dan 29 unit rusak sedang.

Selain bencana-bencana di atas, beberapa tahun belakangan bencana kebakaran juga berpotensi terjadi di Kota Ambon. Kondisi permukiman padat perkotaan yang kadang tidak tertata, sangat rawan terhadap kebakaran. Pada tahun 2017, terjadi peristiwa kebakaran terhadap 26 kepala Keluarga (KK) atau 81 jiwa di Kelurahan Pandan Kasturi Kecamatan Sirimau.

Selain bencana-bencana di atas, Kota Ambon juga berpotensi bencana genangan air/ rob. Bencana Genangan Air/Rob merupakan ancaman tersendiri bagi beberapa wilayah di Kota Ambon, mengingat banyaknya pemukiman di wilayah pesisir ataupun dipinggiran pantai. Umumnya gelombang pasang terjadi karena adanya angin kencang, perubahan cuaca yang sangat cepat, dan pengaruh dari gravitasi bulan maupun matahari, yang berakibat Terjadinya Genangan atau Banjir Rob di daratan.

b. Kondisi Demografi

Sebagai Pusat Kegiatan Nasional (PKN) di Propinsi Maluku, Kota Ambon berkembang sangat dinamis, sehingga turut berpengaruh terhadap dinamika jumlah penduduk.

1) Jumlah, Pertumbuhan, dan Kepadatan Penduduk

Jumlah penduduk Kota Ambon tahun 2017 berdasarkan Data Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Ambon, berjumlah 376.152 jiwa (Gambar II.7). Jumlah penduduk tahun 2017 mengalami penurunan sebesar 8,26% dari pencatatan tahun 2016, sebesar 429.910 jiwa.

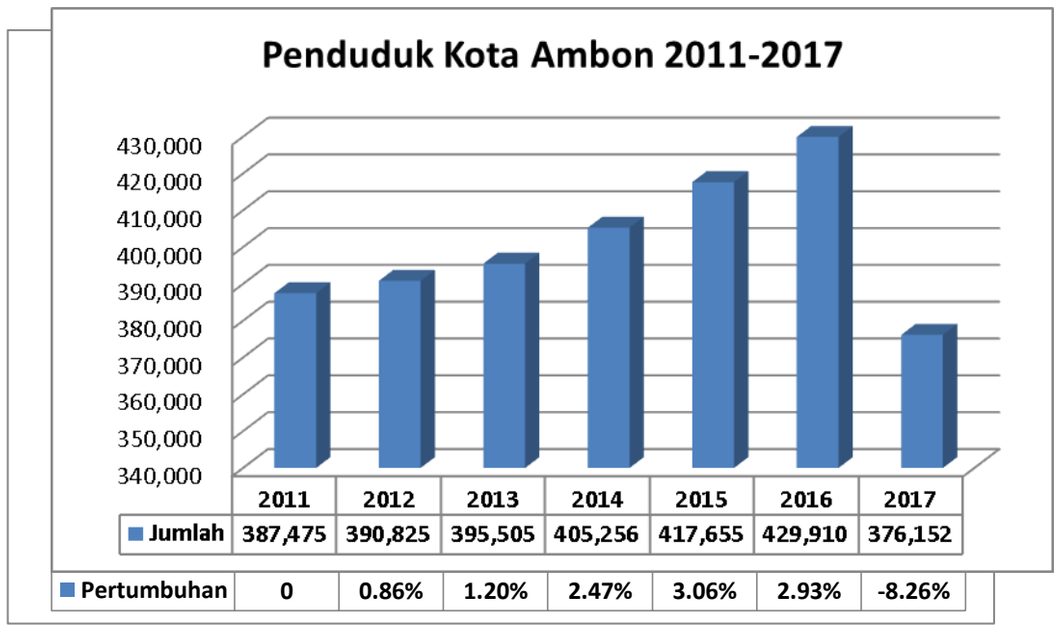

	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Jumlah	387,475	390,825	395,505	405,256	417,655	429,910	376,152
Pertumbuhan	0	0.86%	1.20%	2.47%	3.06%	2.93%	-8.26%

Sumber: Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Ambon, 2018

Gambar II.7. Jumlah Penduduk Kota Ambon Tahun 2011 – 2017

Penurunan jumlah penduduk tahun 2017 terhadap tahun 2016 disebabkan oleh hasil konsolidasi data kependudukan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Ambon dan Kementerian Dalam Negeri RI. Hal ini dilakukan berdasarkan hasil Verifikasi Data Base dalam Sistim Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) yang dilakukan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil di seluruh Indonesia termasuk Kota Ambon sesuai surat Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kementerian Dalam Negeri Nomor: 470/4894/Dukcapil, tanggal 28 Juni 2017. Data Konsolidasi Bersih (DKB) hasil Verifikasi Data Base dalam SIAK Kota Ambon, menunjukan adanya penduduk Kota Ambon yang memiliki data ganda, telah pindah domisili ataupun yang telah meninggal, namun masih tercatat sebagai penduduk Kota Ambon. Dengan demikian Data Konsolidasi Bersih (DKB)

pelayanan SIAK Kota Ambon Semester II Tahun 2017 menunjukan jumlah penduduk Kota Ambon Tahun 2017 adalah sebanyak 376.152 jiwa.

Penduduk Kota Ambon tersebar pada 5 kecamatan (Tabel II.4), dimana Kecamatan Sirimau memiliki penduduk terbanyak yaitu 161.262 jiwa (42,87%) dengan kepadatan 1.857 jiwa/km^2. Pada sisi lain, Kecamatan Leitimur Selatan memiliki jumlah penduduk terkecil yaitu 10.226 jiwa (2,72%) dengan kepadatan 202 jiwa/km^2. Kepadatan penduduk di Kota Ambon tahun 2017 adalah 1.046 jiwa/km^2.

Tabel II.4. Kepadatan Penduduk Tiap Kecamatan Tahun 2017

No	Kecamatan	Luas Wilayah Daratan (Km^2)	Jumlah Penduduk (Jiwa)	Prosentase Terhadap Total Penduduk (%)	Kepadatan Penduduk (Jiwa/ Km^2)
1	Nusaniwe	88,35	99.397	26,42	1.125
2	Sirimau	86,81	161.262	42,87	1.857
3	T.A.Baguala	40,11	59.854	15,91	1.492
4	Teluk Ambon	93,68	45.413	12,07	484
5	Leitimur Selatan	50, 50	10.226	2,72	202
Kota Ambon		**359,45**	**376.152**	**100**	**1.046**

Sumber : Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Ambon Tahun 2018

2) Komposisi Penduduk Menurut Jenis Kelamin

Penduduk Kota Ambon bila diklasifikasikan menurut jenis kelamin, sesuai Data Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Ambon, pada tahun 2017 menunjukan bahwa dari 376.152 jiwa penduduk, terdapat laki-laki sebanyak 188.863 jiwa (50,21%) dan perempuan sebanyak 187.289 jiwa (49,79%), yang tersebar pada 5 Kecamatan seperti pada Tabel II.5.

Tabel II.5. Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin Tiap Kecamatan Tahun 2017

No	Kecamatan	Laki-Laki (Jiwa)	Perempuan (Jiwa)	Jumlah Penduduk (Jiwa)
1	Nusaniwe	49.424	49.973	99.397
2	Sirimau	80.839	80.423	161.262
3	T.A.Baguala	30.277	29.577	59.854
4	Teluk Ambon	23.260	22.153	45.413
5	Leitimur Selatan	5.063	5.163	10.226
Kota Ambon		**188.863**	**187.289**	**376.152**

Sumber: Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Ambon, 2018

3) Komposisi Penduduk Menurut Struktur Usia

Dilihat dari struktur usia (Gambar II.8), Penduduk Kota Ambon tahun 2017 yang berjumlah 376.152 jiwa, lebih didominasi penduduk usia produktif (usia 15 tahun sampai 59 tahun) yaitu berjumlah 260.659 jiwa atau 69,30%, diikuti penduduk usia muda (usia kurang dari 14 tahun) berjumlah 84.023 jiwa atau 22,34%, dan penduduk yang berusia lanjut (usia lebih dari 60 tahun) berjumlah 31.470 jiwa atau 8,36%.

Penduduk usia produktif yang sebesar 69,30% adalah berpotensi untuk bekerja dan produktif, dalam menunjang perekonomian keluarga, sekaligus penggerak perekonomian Kota Ambon. Pada usia produktif ini, potensi penduduk berusia 20 sampai 40 tahun, yang merupakan tenaga kerja potensial berjumlah 142.351 orang atau 37,8%.

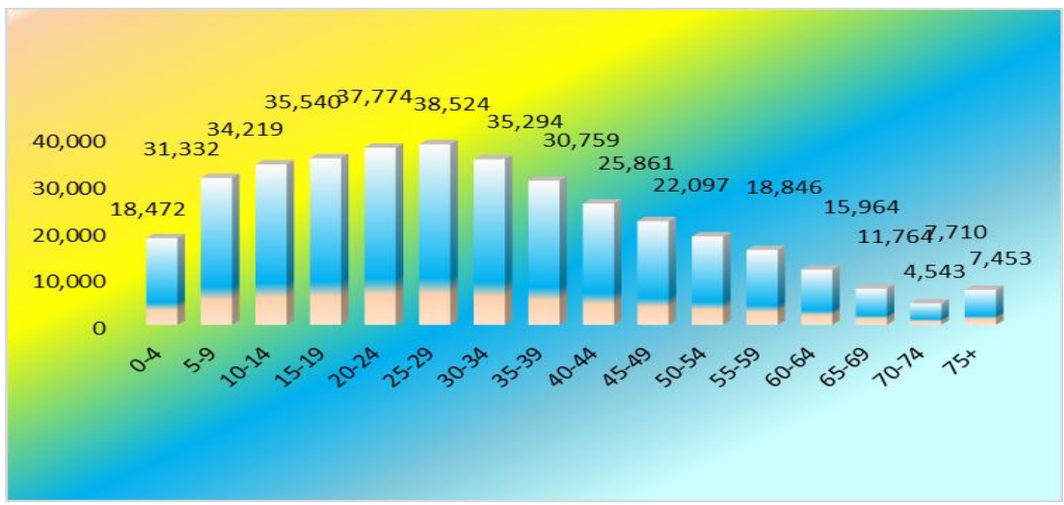

Sumber: Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Ambon, 2016

Gambar II.8. Struktur Usia Penduduk Kota Ambon Tahun 2017

2.1.2. Aspek Kesejahteraan Masyarakat

Kondisi kesejahteraan masyarakat di Kota Ambon selama tahun 2017, sebagai pencapaian Indikator Kinerja Kunci (IKK) pembangunan Kota Ambon, dapat dilihat pada Tabel II.6. Beberapa capaian indikator aspek ini dalam Tabel II. 6 akan dijelaskan lebih rinci di bawah ini, sedangkan untuk beberapa capaian makro ekonomi masih menggunakan data tahun 2016. Aspek kesejahteraan masyarakat yang diuraikan adalah kondisi makro ekonomi daerah, dan kondisi kesejahteraan social.

Tabel II.6 : IKK Kesejahteraan Masyarakat

1) Produk Ekonomi Regional Bruto (PDRB) dan Pertumbuhan PDRB

Dalam kurun waktu lima tahun terakhir, ekonomi Kota Ambon yang diukur dengan besaran PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) maupun Atas Dasar Harga Konstan Tahun 2010 (ADHK 2010), terus mengalami peningkatan. Hal ini menunjukan bahwa geliat aktivitas perekonomian di Kota Ambon menunjukan pertumbuhan yang berkembang maju (Gambar II.9).

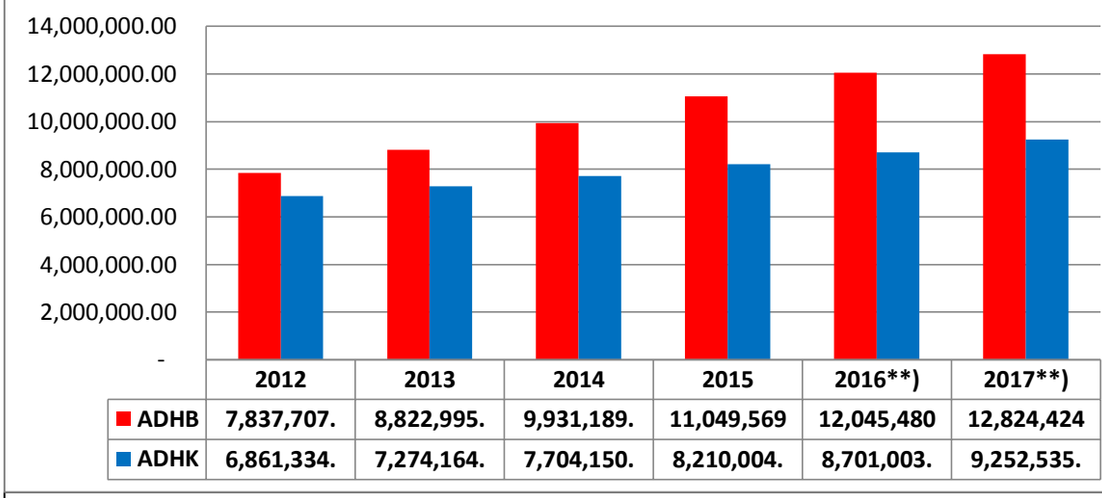

	2012	2013	2014	2015	2016**)	2017**)
ADHB	7,837,707.	8,822,995.	9,931,189.	11,049,569	12,045,480	12,824,424
ADHK	6,861,334.	7,274,164.	7,704,150.	8,210,004.	8,701,003.	9,252,535.

**) Data Sementara
Sumber: BPS Kota Ambon, 2016.

Gambar II.9. PDRB Kota Ambon ADHK 2010 Tahun 2012-2017

Pada tahun 2017, PDRB Kota Ambon atas dasar Harga Berlaku (ADHB) mencapai Rp.12,824 trilyun lebih, atau meningkat sebesar Rp.778 milyard lebih (6,47%%) dibanding tahun 2016 yang sebesar Rp.12,045 trilyun lebih. Sementara itu, PDRB Kota Ambon tahun 2017 atas dasar Harga Konstan (tahun 2010) mencapai Rp.9,252 trilyun lebih. PDRB atas dasar Harga Konstan (ADHK) ini meningkat sebesar Rp.551 milyar lebih (6,34%) dibanding tahun 2016 yang adalah Rp.8,701 trilyun lebih.

Mengacu kepada pertumbuhan PDRB (atas dasar harga konstan 2010), maka pertumbuhan ekonomi Kota Ambon terus mengalami pertumbuhan positif dalam kurun waktu beberapa tahun terakhir, meskipun cenderung melambat dari tahun 2012 (Gambar II.10). Namun demikian, pertumbuhan ekonomi tahun 2017 sebesar 6,34% mengalami kenaikan dari tahun 2016 yang sebesar 5,98%.

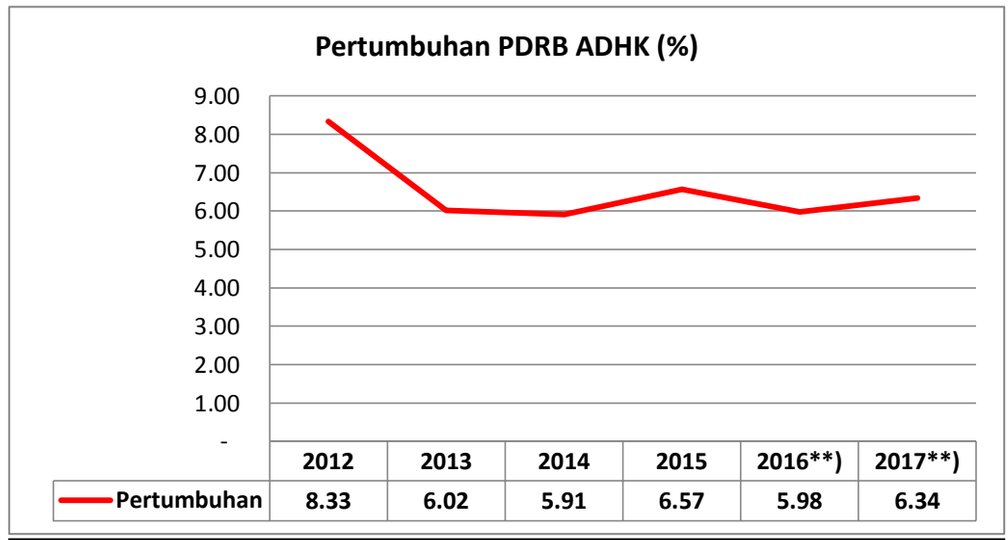

**) Data Sementara
Sumber: BPS Kota Ambon, 2016.

Gambar II.10. Pertumbuhan Ekonomi Kota Ambon Tahun 2012-2017 (ADHK Tahun 2010)

2) Laju Inflasi

Inflasi merupakan suatu keadaan yang mengindikasikan semakin lemahnya daya beli masyarakat yang diikuti dengan semakin lemahnya/ merosotnya nilai riil mata uang suatu negara. Inflasi memberikan indikasi adanya kenaikan harga-harga secara umum dan terus menerus selama periode tertentu, meskipun kenaikan harga-harga tersebut tidak secara bersamaan.

Tabel II.7. Inflasi Kota Ambon Tahun 2011-2016 Dirinci Per Bulan

No.	Bulan	Laju Inflasi Indeks Umum (%)						
		2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
1	Januari	-0,83	1,62	1,81	0,81	2,37	0,28	0,28
2	Pebruari	0,04	1,31	-2,29	0,85	1,03	0,18	-0,74
3	Maret	-0,46	1,33	0,79	0,64	0,44	-0,36	1,13
4	April	0,09	0,79	0,27	0,92	0,33	-1,07	-0,76
5	Mei	1,66	0,06	2,25	0,40	1,06	1,64	0,2
6	Juni	3,76	2,39	-0,15	0,18	-0,25	0,23	2,91
7	Juli	-1,20	1,70	4,30	0,14	1,03	0,5	0,86
8	Agustus	0,83	0,19	4.79	0,12	-1,77	0,43	-2,08
9	September	-0,40	-1,87	-0,92	-0,26	0,38	-0,11	-0,23
10	Oktober	-0,67	-2,44	-3,82	0,15	1,02	0,53	-1.28
11	Nopember	-0,34	0,63	0,53	0,82	-0,44	0,48	-0.59
12	Desember	0,43	0,94	1,51	1,85	0,62	0,53	0.34
Laju Inflasi Kumulatif		**2,85**	**6,37**	**8,81**	**6,81**	**5,92**	**3,28**	**-0,05**

Sumber: BPS Kota Ambon, 2018.

Secara keseluruhan, Kota Ambon selama tahun 2017 mengalami deflasi, atau inflasi sebesar -0,05% (Tabel II.7). Inflasi negatif atau deflasi Kota Ambon tahun 2017 ini adalah pertama kali terjadi sejak tahun 2011. Kondisi ini menggambarkan bahwa selama tahun 2017, harga-harga cenderung terkendali, malah lebih rendah dari tahun 2017. Inflasi tertinggi selama tahun 2107 terjadi di bulan Juni sebesar 2,91%. Sedangkan inflasi negatif atau deflasi terjadi di bulan Pebruari, April, Agustus, September, Oktober, Nopember, dan Desember.

3) PDRB Per Kapita

Keberhasilan pembangunan di berbagai bidang sangat berpengaruh pada pendapatan regional per kapita di Kota Ambon. Selain itu, upaya-upaya Pemerintah Kota Ambon untuk mengembangkan program-program unggulan dan pendekatan penguatan ekonomi masyarakat juga sangat berimplikasi pada peningkatan pendapatan masyarakat, dan hal ini terlihat jelas dari adanya peningkatan pendapatan domestik regional per kapita di Kota Ambon. Data pendapatan domestik regional per kapita di Kota Ambon yang ditampilkan adalah data tahun 2016.

Pendapatan domestik regional per kapita tahun 2016 di Kota Ambon berdasarkan Harga Konstan Tahun 2010 adalah Rp.20,33 juta, meningkat sekitar Rp.430.000- (2,16%) dari tahun sebelumnya. Sedangkan berdasarkan Harga Berlaku adalah Rp.28,14 juta,- meningkat sekitar Rp.1,30 juta (4,84%) dari tahun sebelumnya (Gambar II.11).

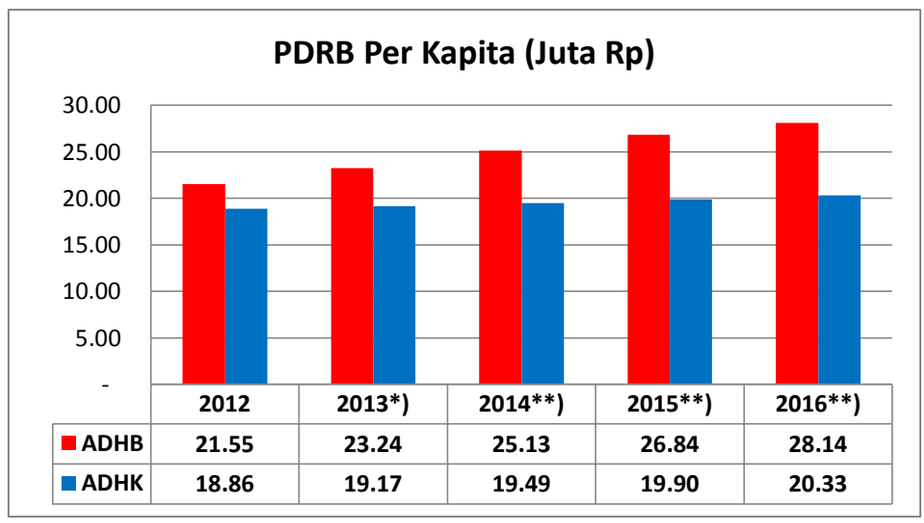

	2012	2013*)	2014**)	2015**)	2016**)
ADHB	21.55	23.24	25.13	26.84	28.14
ADHK	18.86	19.17	19.49	19.90	20.33

*) Data Diperbaiki **) Data Sementara
Sumber: BPS, Kota Ambon Dalam Angka, 2017

Gambar II.11. Pendapatan Regional Perkapita Kota Ambon Tahun 2012-2016

Secara riil pendapatan yang diterima setiap penduduk Kota Ambon tahun 2016 adalah sebesar Rp.20,33,- juta (ADHK), yang dihitung berdasarkan kondisi tahun 2010. Dengan demikian dapat diartikan bahwa pendapatan per kapita ADHB sebesar Rp.28,14 juta yang diterima setiap penduduk Kota Ambon tahun 2016, adalah setara dengan Rp.19,90 juta pada tahun 2010.

4) Indeks Pembangunan Manusia

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan suatu indikator untuk mengukur keberhasilan dalam upaya membangun kualitas hidup manusia (masyarakat/ penduduk). IPM dibentuk oleh tiga dimensi dasar, yaitu: (1) umur panjang dan hidup sehat (*a long and healthy life*); (2) pengetahuan (*knowledge*); dan standar hidup (*decent standard living*).

Tabel II.8. Indeks Pembangunan Manusia Kota Ambon Tahun 2011 – 2017

No.	Indikator IPM	Kota Ambon							Provinsi Maluku	
		2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2016	2017
1	Umur Harapan Hidup (Tahun)	68,82	68,97	68,11	69,46	69,56	69,74	69,92	65,35	65,40
2	2.1. Harapan Lama Sekolah (Thn)	14,87	15,11	15,35	15,88	15,89	15,90	15,91	13,76	13,91
	2.2. Rata-rata Lama Sekolah (Tahun)	11,00	11,21	11,44	11,61	11,63	11,64	11,65	9,26	9,38
3	Pengeluaran Per Kapita (Ribu Rp.)	12.535	12.862	13.047	13,146	13.318	13.497	13.699	8.215	8.433
Indeks Pembangunan Manusia		**76,70**	**77,49**	**78,16**	**79.09**	**79,30**	**79,55**	**79,82**	**67,60**	**68,19**
Peringkat Tingkat Provinsi		**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**-**	**-**

Sumber: BPS Kota Ambon, 2018

Umur panjang dan hidup sehat digambarkan oleh Umur Harapan Hidup saat lahir (UHH), yaitu jumlah tahun yang diharapkan dapat dicapai oleh bayi yang baru lahir untuk hidup, dengan asumsi bahwa pola angka kematian menurut umur pada saat kelahiran sama sepanjang usia bayi.

Pengetahuan diukur melalui Rata-Rata Lama Sekolah, dan Harapan Lama Sekolah. Rata-Rata Lama Sekolah (RLS) adalah rata-rata lamanya (tahun) penduduk usia 25 tahun ke atas dalam menjalani pendidikan formal. Harapan Lama Sekolah (HLS) adalah lamanya (tahun) sekolah

formal yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu di masa mendatang.
Standar hidup yang layak digambarkan oleh pengeluaran per kapita disesuaikan, yang ditentukan dari nilai pengeluaran per kapita dan paritas daya beli.

Indeks pembangunan manusia (IPM) Kota Ambon Tahun 2017 dapat dilihat pada Tabel II.8. Capaian IPM Kota Ambon tahun 2017 sebesar 79,82 dan berada pada kategory tinggi (antara 70 sampai 80). Seluruh komponen IPM tahun 2017 meningkat dari tahun sebelumnya, dimana umur harapan hidup adalah 69,92 tahun, harapan lama sekolah adalah 15,91 tahun, rata-rata lama sekolah adalah 11,65 tahun, dan pengeluaran per kapita penduduk adalah Rp.13.699.000,-.

5) Angka Melek Huruf

Angka Melek Huruf (dewasa) adalah proporsi penduduk berusia 15 tahun ke atas yang dapat membaca dan menulis dalam huruf latin atau lainnya. Data yang tersedia adalah data tahun 2016.

Penduduk yang melek huruf di Kota Ambon, selama 6 tahun terakhir terus bertambah, dan sampai tahun 2016 telah berjumlah 99,88%. Perkembangan angka melek huruf di Kota Ambon, selama tahun 2011-2016, adalah sebagaimana Gambar II.12.

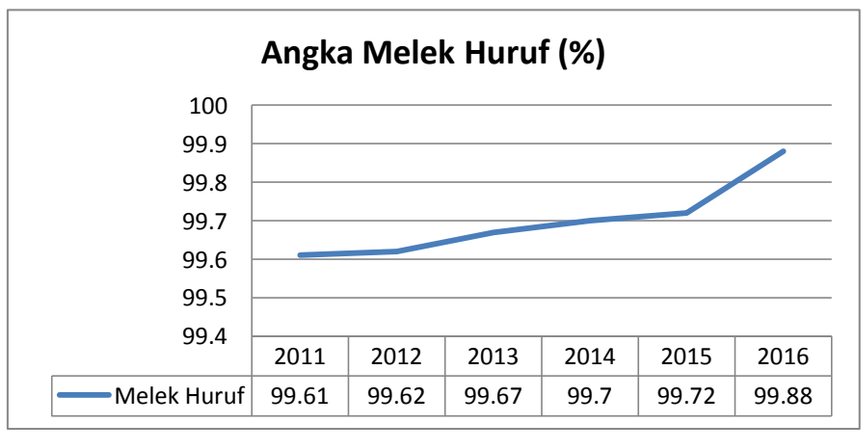

Sumber: Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) Kota Ambon Tahun 2011-2016

Gambar II.12. Angka Melek Huruf Kota Ambon Tahun 2011-2016

6) Kemiskinan

Penduduk Miskin di kota Ambon tahun 2017 berdasarkan Data BPS Kota Ambon berjumlah 4,64% (Gambar II.13), masih dibawah target RPJMD untuk tahun 2017 sebesar 5%. Prosentase ini cenderung menurun sejak tahun 2010, dan berada di bawah 5% sejak tahun 2013.

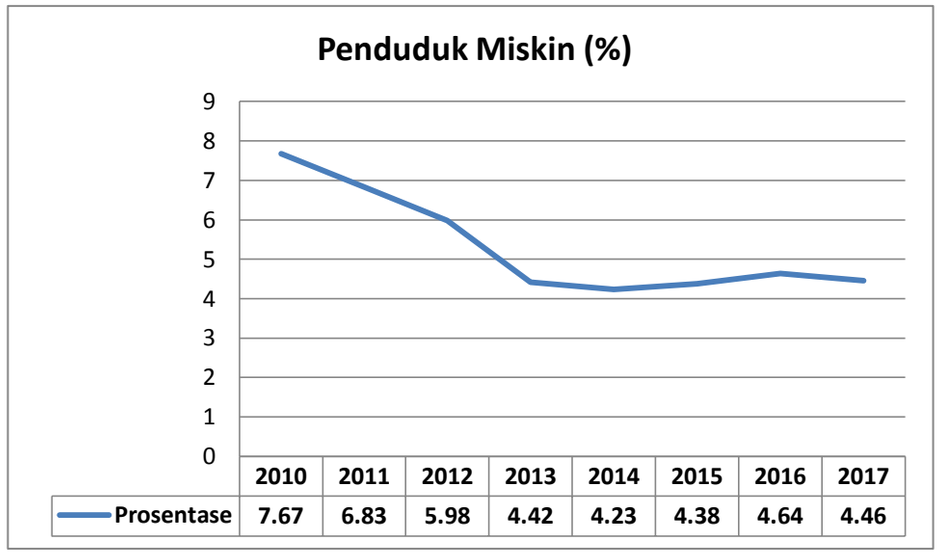

Gambar II.13. Prosentase Penduduk Miskin di Kota Ambon Tahun 2010 – 2017

7) Kesempatan Kerja

Berdasarkan Data Base Kependudukan pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Ambon tahun 2018, penduduk Kota Ambon Tahun 2016, bila dilihat dari jenis pekerjaan adalah sebagaimana mana Gambar II.14.

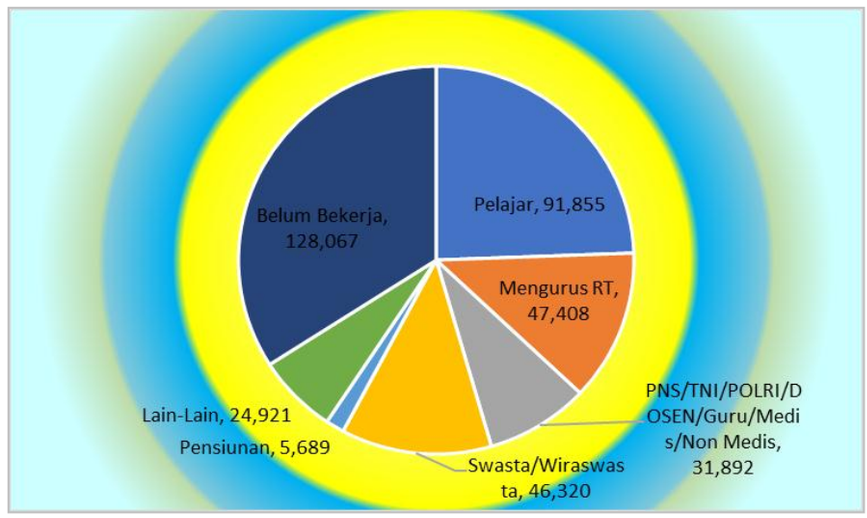

Sumber: Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Ambon Tahun 2018

Gambar II.14. Jenis Pekerjaan Penduduk Kota Ambon Tahun 2017

Pengelompokkan penduduk Kota Ambon tahun 2017 berdasarkan jenis pekerjaan (Gambar II.14), diurut dari yang banyak hingga yang paling sedikit adalah: Belum/Tidak Bekerja sebanyak 128.067 jiwa atau 34,05%; Pelajar/Mahasiswa sebanyak 91.855 jiwa atau 24,42%; Karyawan Swasta/ Wiraswasta sebanyak 46.320 jiwa atau 12,31%; Pengurus Rumah Tangga sebanyak 47.408 jiwa atau 12,60%; pekerjaan

lain-lain sebanyak 24.921 jiwa atau 6,63%; dan Pensiunan sebanyak 5.689 jiwa atau 1,51%.

Berdasarkan pengelompokan penduduk menurut jenis pekerjaan, dan pengelompokan penduduk menurut struktur usia, maka bila penduduk yang belum/tidak bekerja dikurangi dengan penduduk usia muda (kurang dari 14 tahun) dan penduduk usia lanjut (lebih dari 60 tahun) maka terdapat 15.992 jiwa atau 4,25% penduduk Kota Ambon yang menganggur.

8) Seni, Budaya dan Olahraga

Pembangunan bidang seni, budaya dan olahraga sangat terkait erat dengan kualitas hidup manusia dan masyarakat. Hal ini sesuai dengan sasaran pencapaian pembangunan bidang sosial budaya dan keagamaan yaitu (i) untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang berakhlak mulia, bermoral, beretika, berbudaya dan beradab; serta (ii) mewujudkan bangsa yang berdaya saing untuk mencapai masyarakat yang lebih makmur dan sejahtera.

Penyelenggaraan seni, budaya dan olahraga di Kota Ambon tahun 2017 adalah dalam mewujudkan Ambon yang harmonis, sesuai visi Kota Ambon Tahun 2017-2022, sekaligus mewujudkan tahun kunjungan wisata Kota Ambon 2020, dan menuju Ambon Kota Music dunia. Sebagai kota budaya, dan kota seni, Kota Ambon disebutkan pula sebagai kota musik (*city of music*), dengan terpelihara seni dan budaya local, termasuk pengembangan Negeri – Negeri di Kota Ambon sebagai desa adat dan budaya. Sejak tahun 2016, telah dicanangkan Kota Ambon menuju Kota Musik Dunia, dan dalam fasilitas Badan Ekonomi Kreatif (BEKRAF), telah dilakukan langkah-langkah nyata secara bertahap untuk mewujudkannya.

Terdapat beberapa sanggar seni, *event organizer*, ataupun grup-grup music dan paduan suara yang secara berkala melakukan pentas seni, dan budaya. Pada acara-acara tingkat internasional, nasional, maupun lokal, pentas seni dan budaya menjadi sungguhan tetap, untuk tetap mendorong kecintaan terhadap perilaku yang beretika, beraklak mulia, dan berbudaya. Lokasi pentas seni dan budaya di Kota Ambon antara lain Lapangan Merdeka, Taman Pattimura, Taman Gong Perdamaian, *Sport Hall* Karang Panjang, Gedung Budaya, Lapangan Mandala, dan berbagai gedung pertemuan baik milik pemerintah maupun masyarakat.

Pada sisi lain, sarana olah raga yang tersedia di Kota Ambon, tersebar di berbagai tempat, dan umumnya adalah milik masyarakat atau swasta. Sarana olahraga yang dimiliki pemerintah adalah Stadiun Mandala Remaja sebagai kesatuan pembinaan olahraga di Kota Ambon dan Provinsi Maluku, Lapangan Merdeka untuk sepak bola dan atletik, Lapangan *volley*, Lapangan Basket di Taman Pattimura, serta *Sport Hall* untuk tinju, bulu tangkis, dan jenis-jenis olahraga *indoor* lainnya.

2.1.3. Aspek Pelayanan Umum

Pelayanan umum di Kota Ambon tahun 2017 meliputi urusan wajib, urusan pilihan, dan penunjang urusan. Pelayanan umum urusan wajib, meliputi layanan urusan wajib dasar dan layanan urusan wajib non dasar.

Layanan urusan wajib dasar, meliputi pendidikan; kesehatan; pekerjaan umum dan penataan ruang; perumahan rakyat dan kawasan permukiman; ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat; serta social.

Layanan urusan wajib non dasar, meliputi tenaga kerja; pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak; lingkungan hidup; administrasi kependudukan dan pencatatan sipil; pemberdayaan masyarakat dan desa; pengendalian penduduk dan KB; perhubungan; pangan; komunikasi dan informatika; koperasi dan usaha mikro; penanaman modal; kepemudaaan dan olahraga; statistic, kebudayaan; perpustakaan; dan kearsipan.

Layanan urusan pilihan, meliputi pariwisata; pertanian; perdagangan; perindustrian; dan perikanan.

Layanan penunjang urusan, meliputi perencanaan pembangunan; keuangan daerah; kepegawaian, serta pendidikan dan pelatihan; pengawasan; dan secretariat DPRD.

Capaian aspek pelayanan umum Kota Ambon Tahun 2017 dapat dilihat pada Tabel II. 9.

Tabel II.9

2.1.4. Aspek Daya Saing Daerah

Daya saing daerah Kota Ambon diukur dari kemampuan ekonomi daerah berdasarkan pengeluaran rata-rata per kapita dan rasio ketergantungan penduduk, sebagaimana terlihat pada Tabel II.10. Capaian aspek daya saing daerah untuk pengeluaran rata-rata per kapita ini adalah kondisi tahun 2015.

Selama tahun 2010-2015, pengeluaran per kapita penduduk Kota Ambon (Gambar II.15), meningkat sebesar rata-rata 7,56% per tahun. Namun dalam 3 tahun terakhir, khususnya tahun 2013, 2014, dan 2015, pengeluaran per kapita cenderung menurun. Pada tahun 2015, pengeluaran per kapita sebulan penduduk Kota Ambon adalah Rp.1.141.704,- atau menurun sebesar 4,43% dari tahun 2014. Dari pengeluaran tersebut, sebanyak 46,54% atau Rp.531.307,- digunakan untuk makanan, dan sisanya 53,46% atau Rp.610.397 untuk bukan makanan.

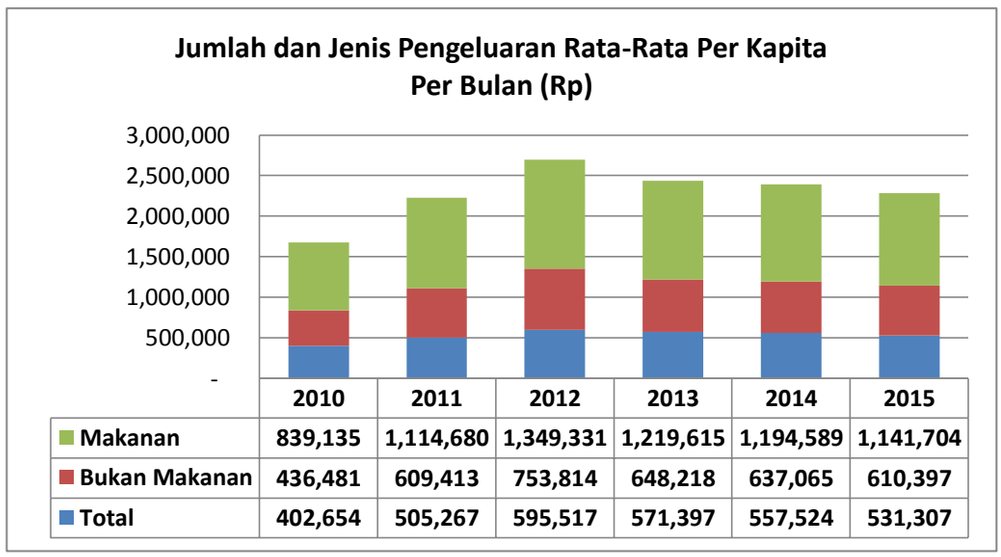

	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Makanan	839,135	1,114,680	1,349,331	1,219,615	1,194,589	1,141,704
Bukan Makanan	436,481	609,413	753,814	648,218	637,065	610,397
Total	402,654	505,267	595,517	571,397	557,524	531,307

Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Ambon, 2017

Gambar II.15. Jumlah dan Jenis Pengeluaran Per Kapita Kota Ambon Tahun 2010-2015

Pada tahun 2015, terdapat 6 peringkat teratas jenis pengeluaran rata-rata per kapita masyarakat Kota Ambon untuk makanan, yaitu makanan jadi (28,44%), padi-padian (14,48%), ikan (12,07%), tembakau (10,03%), sayur-sayuran (8,31%), serta telur dan susu (7,58%). Sedangkan jenis pengeluaran rata-rata untuk bukan makanan terutama digunakan untuk perumahan dan fasilitasnya (56,19%), serta barang dan jasa (29,92%).
Mengacu kepada pengeluaran untuk makanan, maka tembakau masih menjadi salah satu pengeluaran utama pada tahun 2015. Hal ini perlu menjadi perhatian, untuk mengefektifkan perilaku hidup bersih dan sehat, dengan membatasi kebiasaan merokok di dalam rumah dan ruang publik.

Tabel II.10

2.2. Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD sampai Tahun Berjalan 2018 dan Realisasi RPJMD

Penyusunan RKPD Kota Ambon Tahun 2018 berada pada masa transisi. Ketika penyusunan RKPD Kota Ambon Tahun 2018, mengacu kepada RPJP Kota Ambon Tahun 2006-2026, dan Rancangan Awal RPJMD Kota Ambon Tahun 2017-2022, karena Walikota dan Wakil Walikota Ambon Tahun 2017-2022 dilantik pada 22 Mei 2017, dan Peraturan Daerah Kota Ambon tentang RPJMD Kota Ambon Tahun 2017-2022, ditetapkan pada akhir tahun 2017. Karena itu realisasi RPJMD untuk tahun 2018, bisa saja belum seirama dengan RKPD Tahun 2018..

Pelaksanaan program dan kegiatan pada RKPD Tahun 2018, diimplementasikan dalam pengganggaran tahun 2018, melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2018. Jika membandingkan pagu Anggaran pada RKPD Kota Ambon Tahun 2018, dan APBD Kota Ambon Tahun 2018 (Tabel II.11), pendapatan pada APBD Kota Ambon Tahun 2018 dirancangkan lebih sebesar Rp. 20.535.333.995,- dari RKPD Tahun 2018. Secara signifikan, komponen penyumbang lebihnya pendapatan pada APBD Kota Ambon Tahun 2018, terhadap RKPD Tahun 2018, adalah bertambahnya pagu penerimaan pada Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Dana Alokasi Khusus, dan Dana Hibah.

Seiiring dengan pendapatan daerah, maka belanja daerah pada APBD Kota Ambon Tahun 2018, juga dirancangkan lebih sebesar Rp.56.035.333.994,- dari RKPD Kota Ambon Tahun 2018. Dari semua komponen belanja di APBD Kota Ambon Tahun 2018, hanya belanja pegawai yang dirancangkan kurang dari RKPD Kota Ambon Tahun 2018. Hal ini menunjukan bahwa Pemerintah Kota Ambon telah berhasil menekan jumlah belanja pegawai sebesar Rp.149.019.569.797,- atau 23,81%

Adapun pelaksanaan RKPD Kota Ambon melalui APBD Kota Ambon Tahun 2018, khususnya pada belanja langsung perangkat daerah pada Triwulan Pertama Tahun 2018, disajikan pada Tabel II.12. Belanja langsung tersebut belum termasuk Sekretaris Daerah, Kepala Dearah, dan Kelurahan.

Sampai dengan akhir Maret 2018, pelaksanaan 1.625 kegiatan pada 42 perangkat daerah menyerap dana sebesar Rp 17.271.652.897,- atau 2,91% dari pagu anggaran sebesar Rp.592.671.771.494; dengan realisasi fisik sebesar rata-rata 11,23%. Penyerapan anggaran yang masih rendah pada triwulan pertama tahun 2017, adalah karena belum semua kegiatan fisik dan belanja modal terealisasi pada triwulan ini. Pada triwulan pertama, proses pengadaan barang dan jasa masih belum semua selesai.

Tabel II.11. Perbandingan Pendapatan Daerah, Belanja Daerah, dan Pembiayaan Daerah Berdasarkan RKPD dan APBD Kota Ambon Tahun 2018

NO	URAIAN	JUMLAH (Rp)		SELISIH
		RKPD 2018	APBD 2018	
1	*2*	*3*	*4*	*5*
1	**PENDAPATAN**	**Rp 1,135,667,841,548**	**Rp 1,156,203,175,443**	**Rp (20,535,333,895)**
1.1	**Pendapatan Asli Daerah**	**Rp 132,624,717,603**	**Rp 143,323,440,498**	**Rp (10,698,722,895)**
1.1.1	Pendapatan Pajak Daerah	Rp 76,001,439,563	Rp 83,214,390,976	Rp (7,212,951,413)
1.1.2	Retribusi Daerah	Rp 39,794,763,488	Rp 38,559,836,722	Rp 1,234,926,766
1.1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	Rp 1,500,000,000	Rp 2,935,000,000	Rp (1,435,000,000)
1.1.4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	Rp 15,328,514,552.00	Rp 18,614,212,800	Rp (3,285,698,248)
1.2	**Dana Perimbangan**	**Rp 895,614,214,000**	**Rp 889,674,316,000**	**Rp 5,939,898,000**
1.2.1	Bagi Hasil Pajak/ Bagi Hasil Bukan Pajak	Rp 33,704,303,000	Rp 33,274,272,000	Rp 430,031,000
1.2.2	Dana Alokasi Umum	Rp 686,184,418,000	Rp 674,130,364,000	Rp 12,054,054,000
1.2.3	Dana Alokasi Khusus	Rp 175,725,493,000	Rp 182,269,680,000	Rp (6,544,187,000)
1.3	**Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah**	**Rp 107,428,909,945**	**Rp 123,205,418,945**	**Rp (15,776,509,000)**
1.3.1	Pendapatan Hibah	Rp -	Rp 55,480,000,000	Rp (55,480,000,000)
1.3.2	Dana Darurat	Rp -	Rp -	Rp -
1.3.3	Dana Bagi Hasil Pajak Dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya	Rp 36,536,237,945	Rp 36,536,237,945	Rp -
1.3.4	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	Rp 70,892,672,000	Rp 31,189,181,000	Rp 39,703,491,000
1.3.5	Bantuan Keuangan dari Provinsi/Pemerintah Daerah Lainnya	Rp -	Rp -	Rp -
2	**BELANJA**	**Rp 1,143,167,841,449**	**Rp 1,199,203,175,443**	**Rp (56,035,333,994)**
2.1	**Belanja Tidak Langsung**	**Rp 684,939,690,964**	**Rp 606,531,403,949**	**Rp 78,408,287,015**
2.1.1	Belanja Pegawai	Rp 625,830,330,016	Rp 476,810,760,219	Rp 149,019,569,797
2.1.2	Belanja Bunga	Rp -	Rp -	Rp -
2.1.3	Belanja Subsidi	Rp 400,000,000	Rp 487,227,280	Rp (87,227,280)
2.1.4	Belanja Hibah	Rp 7,600,000,000	Rp 16,150,460,750	Rp (8,550,460,750)
2.1.5	Belanja Bantuan Sosial	Rp 3,500,000,000	Rp 7,000,000,000	Rp (3,500,000,000)
2.1.7	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Kota/ Desa	Rp 45,109,360,948	Rp 102,582,955,700	Rp (57,473,594,752)
2.1.8	Belanja Tidak Terduga	Rp 2,500,000,000	Rp 3,500,000,000	Rp (1,000,000,000)
2.2	**Belanja Langsung**	**Rp 458,228,150,485**	**Rp 592,671,771,494**	**Rp (134,443,621,009)**
2.2.1	Belanja Pegawai	Rp 17,000,000,000	Rp 14,137,018,100	Rp 2,862,981,900
2.2.2	Belanja Barang dan Jasa	Rp 153,000,000,000	Rp 376,058,752,781	Rp (223,058,752,781)
2.2.3	Belanja Modal	Rp 288,228,150,485	Rp 202,476,000,613	Rp 85,752,149,872
	SURPLUS/ (DEFISIT)	**Rp (7,500,000,000)**	**Rp (43,000,000,000)**	**Rp 35,500,000,000**
3	**PEMBIAYAAN DAERAH**			
3.1	**Penerimaan Pembiayaan Daerah**	**Rp 10,000,000,000**	**Rp 51,000,000,000**	**Rp (41,000,000,000)**
3.1.1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya	Rp 10,000,000,000	Rp 51,000,000,000	Rp (41,000,000,000)
3.1.4	Penerimaan Pinjaman Daerah dan Obligasi Daerah	Rp -	Rp -	Rp -
3.1.5	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	Rp -	Rp -	Rp -
3.2	**Pengeluaran Pembiayaan Daerah**	**Rp 2,500,000,000**	**Rp 8,000,000,000**	**Rp 8,000,000,000**
3.2.2	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	Rp 2,500,000,000	Rp 8,000,000,000	Rp 8,000,000,000
3.2.3	Pembayaran Pokok Utang	Rp -	Rp -	Rp -
3.2.5	Pembayaran Hutang Kepada Pihak Ke tiga	Rp -	Rp -	Rp -
	PEMBIAYAAN NETTO	**Rp 7,500,000,000**	**Rp 43,000,000,000**	**Rp (35,500,000,000)**
SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKENAAN		**Rp -**	**Rp -**	**Rp -**

Sumber : Hasil Analisis, 2018

Tabel II.12. Rekapitulasi Laporan Evaluasi APBD Kota Ambon Tahun 2017, Kondisi Triwulan I

NO	NAMA PERANGKAT DAERAH	JUMLAH KEGIATAN	JUMLAH DANA TOTAL	REALISASI FISIK (%)	REALISASI DANA (%)	% DANA
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
1	Inspektorat	32	Rp 3,445,935,700	7.03%	Rp 310,315,000	9.01%
2	BAPPEDA LITBANG	40	Rp 6,334,427,850	14.48%	Rp 612,427,388	9.67%
3	Badan Kepegawaian Dan Pengembangan SDM	26	Rp 2,942,236,700	12.37%	Rp 350,989,600	11.93%
4	Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah	70	Rp 10,736,099,237	22.45%	Rp 2,192,760,856	20.42%
5	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	43	Rp 9,131,374,200	9.30%	Rp 2,079,126,500	22.77%
6	Badan Pengelola Pajak Dan Restribusi Daerah	27	Rp 6,997,155,944	20.44%	Rp 679,333,300	9.71%
7	Sekretariat DPRD	39	Rp 29,792,397,756	7.03%	Rp 3,572,801,739	11.99%
8	Dinas Perikanan	18	Rp 2,819,196,203	20.65%	Rp 121,198,746	4.30%
9	Dinas Pendidikan	135	Rp 90,146,316,500	5.51%	Rp 5,894,055,000	6.54%
10	Dinas Pemuda Dan Olahraga	29	Rp 2,684,309,200	13.81%	Rp 176,292,400	6.57%
11	Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan	63	Rp 13,820,261,000	15.25%	Rp 927,839,250	6.71%
12	Dinas Pertanian Dan Ketahanan Pangan	31	Rp 4,500,333,000	6.45%	Rp 41,079,649	0.91%
13	Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman	36	Rp 22,059,630,624	4.55%	Rp 290,420,773	1.32%
14	Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan	24	Rp 1,700,790,400	0.00%	Rp -	0.00%
15	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	26	Rp 2,860,022,350	13.67%	Rp 274,860,366	9.61%
16	Dinas Pemadam Kebakaran Dan Penyelamatan	24	Rp 4,921,578,300	14.21%	Rp 1,006,290,000	20.45%
17	Dinas Kesehatan	113	Rp 58,678,823,201	0.00%	Rp -	0.00%
18	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	46	Rp 137,435,611,381	0.71%	Rp 1,312,475,880	0.95%
19	Dinas Kependudukan Dan Pencataan Sipil	30	Rp 4,105,837,575	6.02%	Rp 703,206,420	17.13%
20	Dinas Perindustrian Dan Perdagangan	28	Rp 5,694,560,475	8.55%	Rp 98,185,514	1.72%
21	Dinas Tenaga Kerja	41	Rp 1,923,055,550	6.89%	Rp 121,150,890	6.30%
22	Dinas Koperasi Dan Usaha Mikro	32	Rp 1,566,600,431	25.60%	Rp 264,986,212	16.91%
23	Dinas Sosial	48	Rp 5,297,797,650	7.17%	Rp 92,339,208	1.74%
24	Dinas Kominfo Dan Persandian	20	Rp 4,688,119,480	3.92%	Rp 179,364,810	3.83%
25	Dinas Pengendalian Penduduk Dan KB	59	Rp 7,015,429,780	11.28%	Rp 554,124,000	7.90%
26	Dinas Lingkungan Hidup Dan Persampahan	52	Rp 39,094,605,544	4.55%	Rp 3,188,507,640	8.16%
27	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Masyarakat Dan Desa	64	Rp 4,449,442,500	23.03%	Rp 1,054,320,700	23.70%
28	Dinas Perhubungan	27	Rp 13,993,760,500	6.09%	Rp 742,432,092	5.31%
29	Bagian Tata Usaha Pimpinan Dan Ekspedisi	21	Rp 1,521,243,400	17.46%	Rp 343,484,625	22.58%
30	Bagian Komunikasi Pimpinan Dan Protokol	14	Rp 1,567,364,500	9.53%	Rp 145,100,500	9.26%
31	Bagian Kesejahteraan Rakyat	23	Rp 5,193,052,800	18.07%	Rp 813,594,200	15.67%
32	Bagian Umum Dan Perlengkapan	43	Rp 28,804,072,450	12.01%	Rp 5,599,650,467	19.44%
33	Bagian Tata Pemerintahan	30	Rp 4,558,259,210	19.79%	Rp 763,366,950	16.75%
34	Bagian Hukum	29	Rp 1,916,087,200	17.20%	Rp 315,930,500	16.49%
35	Bagian Pengadaan Barang Dan Jasa	19	Rp 1,394,053,700	5.54%	Rp 113,904,696	8.17%
36	Bagian Organisasi Dan Tata Laksana	27	Rp 2,656,610,760	16.61%	Rp 423,615,355	15.95%
37	Satuan Polisi Pamong Praja	24	Rp 7,813,881,006	0.00%	Rp -	0.00%
38	Kecamatan Sirimau	37	Rp 988,769,900	8.73%	Rp 67,785,000	6.86%
39	Kecamatan Nusaniwe	31	Rp 978,928,000	13.71%	Rp 94,861,550	9.69%
40	Kecamatan Teluk Ambon Baguala	33	Rp 878,700,600	11.77%	Rp 113,925,000	12.97%
41	Kecamatan Teluk Ambon	38	Rp 900,870,200	30.18%	Rp 269,284,000	29.89%
42	Kecamatan Leitimur Selatan	33	Rp 968,184,400	0.00%	Rp -	0.00%

Sumber: Laporan Pelaksanaan Program dan Kegiatan, Bappeda Litbang 2018

2.3. Permasalahan Pembangunan Daerah

Permasalahan yang dihadapi Pemerintah Kota Ambon dalam pelaksanaan pembangunan selama tahun 2017, yang berhubungan dengan prioritas dan sasaran pembangunan daerah, maupun penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, khususnya dalam pelayanan urusan pemerintahan wajib layanan dasar, dapat dijelaskan sebagai berikut:

a. Urusan pendidikan:

1) belum meratanya akses dan kualitas pendidikan;
2) ketersediaan sarana dan prasana pendidikan serta kualitas mutu pendidikan yang belum seimbang;
3) pelaksanaan pendidikan karakter belum yang belum optimal;
4) pendidikan lingkungan hidup belum terintegrasi dalam kurikulum sekolah; serta
5) belum adanya keberpihakan dunia pendidikan pada anak penyandang disabilitas.

b. Urusan kesehatan:

1) penyakit degeneratif pada kelompok umur lansia cenderung meningkat;
2) cakupan jaminan kesehatan belum optimal sehingga belum menjangkau seluruh warga Kota;
3) masih tingginya jumlah penderita HIV/AIDS dan jumlah penyalahgunaan narkoba, serta masih adanya penyakit menular (demam berdarah/DBD, dan Infeksi Saluran Pernafasan Akut/ISPA, serta diare);
4) belum mencukupinya rasio tenaga kesehatan di puskesmas;
5) masih adanya kematian ibu melahirkan dan bayi;
6) fasilitas pelayanan kesehatan lanjutan bagi penyandang cacat dan lansia belum memadai;
7) serta penanganan limbah medis belum optimal.
8) Belum semua Tenaga Kesehatan dan Sarana Kesehatan Tingkat Pertama, khususnya Pusat kesehatan Masyarakat (PUSKESMAS) memiliki akreditasi sesuai ketentuan.

c. *Urusan pekerjaan umum, dan penataan ruang*

1) belum meratanya kuantitas dan kualitas jalan kota;
2) kondisi jaringan utilitas infrastruktur wilayah masih belum terpadu, kondisi jaringan jalan maupun jalan lingkungan beserta utilitasnya serta fasilitas umum dan sosial kemasyarakatan masih ada yang belum tertata dengan baik;
3) kondisi jaringan pedestrian masih kurang memadai;
4) masih kurang tersedia ruang terbuka hijau publik, maupun ruang terbuka non hijau public, baik dari luas maupun sebarannya;

5) kondisi drainase dan prasarana lainnya masih ada yang belum selaras dengan tata ruang sehingga menimbulkan dampak negatif pada sarana jalan dan menyebabkan banjir dan longsor;
6) belum memadainya kondisi dan fungsi sarana dan prasarana sumber daya air yang dapat memberikan pelayanan untuk mendukung terwujudnya manfaat sumber daya air yang berkelanjutan; serta
7) persoalan air minum yang pelayanannya masih kurang sehingga perlu peningkatan terhadap pelayanannya terutama yang memenuhi syarat kualitas, kuantitas, dan kontinyutas pengalirannya pada rumah-rumah tangga masyarakat Kota Ambon.

d. Urusan perumahan dan kawasan permukiman:

1) terdapatnya beberapa kawasan kumuh di Kota Ambon yang berimplikasi pada penataan hunian permukiman yang layak (rumah sehat);
2) akses sanitasi pemukimam yang memadai belum terbangun secara optimal; serta
3) terbatasnya kemampuan penyediaan permukiman bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

e. Urusan sosial:

1) masih kurangnya sinergi pelaksanaan program-program penanggulangan kemiskinan;
2) belum terlaksananya pemutakhiran data kemiskinan yang bersifat *by name-by address*;
3) masih kurangnya identifikasi mendalam terhadap permasalahan yang menyangkut penyandang masalah kesejahteraan social; serta
4) penanganan trauma pasca becana yang belum terkordinasi secara optimal.

f. Urusan *ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat:*

1) masih adanya sebagian masyarakat yang belum mematuhi Peraturan Daerah dan yang berkaitan dengan ketertiban umum lainnya,
2) masih kurangnya Sarana dan Prasarana yang mendukung Penertiban Pelanggaran,
3) ancaman bencana alam, seperti banjir dan longsor masih mengintai, termasuk ancaman bencana kebakaran di kawasan padat penduduk dan bangunan.